PENGARUH PENGAWASAN TERHADAP EFEKTIVITAS PENYALURAN
BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN DI KECAMATAN BANJAR
KOTA BANJAR

ABSTRAK

Oleh
Maman Sulaeman
(Dosen Politeknik Triguna Tasikmalaya)

Jumlah penduduk yang mendapat bantuan beras untuk rumah tangga miskin baru 2.138 rumah tangga miskin (73,32%) seharusnya 2.916 rumah tangga miskin. Artinya masih ada 768 rumah tangga miskin (26,68%) yang tidak mendapat beras untuk rumah tangga miskin. Permasalahan lainnya ialah pendistribusian beras miskin kepada masyarakat yang kadang terlambat. Pendistribusian ini dilakukan dengan cara menelpon kepada penerima beras miskin satu persatu, dikarenakan tidak adanya jadwal yang pasti mengenai datangnya beras miskin ini dari Badan Urusan Logistik.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Eksplanasi (*Explanatory Research*). Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Banjar Kota Banjar. Pengumpulan data menggunakan angket yang dibagikan kepada 97 masyarakat. Teknik analisa data menggunakan analisis korelasi, koefisien determinasi dan uji hipotesis.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dalam penyaluran beras untuk keluarga miskin di Kecamatan Banjar Kota Banjar berada pada kategori cukup. Efektivitas penyaluran beras untuk keluarga miskin di Kecamatan Banjar Kota Banjar termasuk kategori cukup. Terdapat pengaruh pengawasan terhadap efektivitas penyaluran beras untuk keluarga miskin di Kecamatan Banjar Kota Banjar. Adanya pengaruh pengawasan terhadap efektivitas penyaluran beras untuk keluarga miskin di Kecamatan Banjar Kota Banjar. Artinya apabila camat dapat menerapkan pengawasan dengan baik, maka pelayanan yang diberikan akan semakin efektif. Bagi Camat dapat meningkatkan pengawasan dalam penyaluran beras untuk keluarga miskin di Kecamatan Banjar Kota Banjar terutama dalam menentukan prosedur hubungan dan tata kerjanya, dan senantiasa melaksanakan pemeriksaan kesehatan pegawai dan sebagainya

Kata Kunci : Pengawasan, Efektivitas, Pelayanan.

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF SUPERVISION OF EFFECTIVENESS OF RICE DISTRIBUTION FOR POOR HOUSEHOLD IN BANJAR CITY BANJAR CITY

Problems found is the number of people who received help rice for poor households to the new 2,138 poor households (73.32%) should have 2,916 poor households. This means that there are 768 poor households (26.68%) who did not receive rice for poor households. Another problem is the poor distribution of rice to people who sometimes late. This distribution is done by calling the poor rice recipient one by one, because there is no definite schedule of the arrival of this poor rice from the National Logistics Agency.

The method used in this research is explanatory research (Explanatory Research). This research was conducted in the District of Banjar Banjar. Collecting data using a questionnaire which was distributed to 97 people. Data analysis technique using correlation analysis, coefficient of determination and hypothesis testing.

Based on the results showed that the surveillance Camat in the distribution of rice to poor families in the District of Banjar Banjar in the category enough. The effectiveness of the distribution of rice to poor families in the District of Banjar Banjar, including category enough. There is an influence on the effectiveness of supervision Camat distribution of rice to poor families in the District of Banjar Banjar.

The influence influence on the effectiveness of supervision Camat distribution of rice to poor families in the District of Banjar Banjar. This means that if Camat can impose control well, the service provided will be more effective. For Head may improve supervision of the distribution of rice to poor families in the district of District Banjar on Banjar City, especially in determining the procedure and the relationship of procedure, and always carry out medical examinations of employees, etc.

Keywords: Monitoring, Head, Effectiveness, Services

1.1 Pendahuluan

Program beras untuk rumah tangga miskin telah dilakukan di seluruh Indonesia. Tujuan program beras untuk rumah tangga miskin adalah mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Sebagai program yang dilaksanakan secara nasional, penyalurann beras untuk rumah tangga miskin kepada masyarakat miskin juga dilaksanakan di Kota Banjar. Sasaran penerima beras untuk rumah tangga miskin di Kota Banjar berdasarkan data yang dirilis BPS bulan Desember 2014, sebanyak 26.184 orang (8.606 rumah tangga miskin) yaitu Kecamatan Banjar 2.916 orang (33,88%), Kecamatan Purwaharja 974 orang (11,32%), Kecamatan Pataruman 2.862 orang (33,26%) dan Kecamatan Langensari 1.854 orang (21,54%).

Pelaksanaan penyaluran beras untuk rumah tangga miskin di Kota Banjar mengalami masalah-masalah umum dalam pelaksanaannya. Secara khusus pada Kecamatan Banjar sebagai kecamatan yang paling banyak penduduk miskinnya, salah satu masalah yang ditemui adalah ditemukannya beras miskin (raskin) berkutu (Harian Rakyat, 5 Agustus 2015). Selain itu penyaluran beras untuk rumah tangga miskin yang sering tersendat-sendat dan tidak semua keluarga miskin mendapatkan beras untuk rumah tangga miskin sebagaimana data yang diperoleh dari Kecamatan Banjar sebagai berikut:

TABEL 1.1
JUMLAH RUMAH TANGGA MISKIN KECAMATAN BANJAR
TAHUN 2015

No.	Desa / Kelurahan	Rumah Tangga Miskin		Yang Menerima Raskin	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Desa Balokang	517	17,73	378	73,11
2.	Kelurahan Banjar	365	12,52	278	76,16
3.	Desa Cibeureum	598	20,51	370	61,87
4.	Kelurahan Mekarsari	408	13,99	340	83,33
5.	Desa Neglasari	541	18,55	412	76,16
6.	Kelurahan Situbatu	487	16,70	360	73,92
Jumlah		2.916	100	2138	73.32

Sumber: Kecamatan Banjar, 2015

Berdasarkan data tersebut, persentase jumlah keluarga miskin yang mendapat bantuan beras untuk rumah tangga miskin baru mencapai 73,32%. Untuk keefektifan Program Raskin Tahun 2015, dibentuk Tim Koordinasi bantuan beras untuk rumah tangga miskin Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan sebagai pelaksana Program bantuan beras untuk rumah tangga miskin. Penanggungjawab pelaksanaan Program bantuan beras untuk rumah tangga miskin di Pusat adalah Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat; di Provinsi adalah Gubernur, di Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan di Kecamatan adalah Camat.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyebutkan bahwa kecamatan adalah wilayah kerja camat. Wilayah kekuasaan menunjukan adanya yuridiksi kewenangan didalamnya, sedangkan wilayah kerja lebih merupakan wilayah pelayanan kepada masyarakat. Camat

menjalankan tugas pokok sebagai unsur lini yaitu *to do, to act*. Artinya adalah kecamatan dijadikan sebagai pusat pelayanan pada masyarakat yang bersifat operasional dengan batas wilayah sebagai batas pemberian pelayanan. Kecamatan yang merupakan ujung tombak terutama dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat juga tidak terlepas dari permasalahan yang berkenaan dengan kondisi pelayanan yang relatif belum memuaskan. Baik buruknya pelayanan yang diberikan sangat ditentukan oleh tersedianya sumberdaya aparatur pemerintah yang profesional.

Fungsi kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat ini menjadi relevan jika dilihat dari segi kedekatan jarak, kecepatan waktu dan kualitas pelayanan yang diberikan. Bila fungsi ini dapat dijalankan secara konsisten, maka secara bertahap akan berdampak strategis dalam menekan inisiatif pemekaran daerah kabupaten. Secara empiris, alasan yang sering dikemukakan untuk pemekaran daerah adalah untuk mendekatkan dan meningkatkan kualitas pelayanan

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang kecamatan sepatutnya meningkatkan semangat dari camat dan aparatur kecamatan untuk melaksanakan tugasnya secara optimal. Terbitnya peraturan ini menunjukkan arti penting kecamatan dalam pemerintah daerah dan penyelenggaraan otonomi. Bahkan pada penjelasannya, Peraturan Pemerintah ini menyatakan kecamatan memegang posisi strategis dalam hubungannya dengan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten atau kota.

Berhasil atau tidaknya tujuan program tersebut sangat tergantung kepada faktor manusia sebagai pelaksana baik sebagai pimpinan maupun sebagai

bawahan, karena pada dasarnya organisasi merupakan suatu wadah yang didalamnya terdapat rangkaian kegiatan manusia yang saling bekerjasama secara teratur dari seluruh proses kerja yang terselenggara. Disamping itu keberhasilan pelaksanaan kegiatan organisasi tidak terlepas dari tindakan pengawasan sebagai media meminimalisir tingkat kesalahan dan tingkat penyimpangan. Pengawasan yang dimaksud ini adalah untuk mencegah dan memperbaiki terjadinya ketidaksesuaian, penyelewengan, penyimpangan dan kesalahan dalam tugas dan wewenang pekerjaan yang sudah ditentukan sebelumnya.

Lebih dari itu pengawasan bukan merupakan tindakan mencari kesalahan terhadap manusianya melainkan tindakan mencari kebenaran terhadap hasil yang ingin dicapai. Pengawasan juga merupakan suatu proses usaha untuk menjamin dan mempertahankan berbagai usaha dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Lebih spesifik lagi pengawasan dapat dijadikan sebagai alat ukur untuk mengetahui berhasil atau tidaknya suatu tujuan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi, dapat pula merupakan penilaian terhadap kinerja organisasi serta memberi arahan melalui penerapan peraturan yang berlaku sehingga dapat diketahui apakah semua pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau tidak dan resiko terjadinya penyimpangan-penyimpangan dapat ditekan seminimal mungkin.

1.2 Landasan Teori

1.2.1 Pengertian Pengawasan

Kelangsungan hidup suatu organisasi sangat tergantung dari peranan pengawasan, karena dalam kehidupan dan keberlangsungan organisasi sering

terjadi penyimpangan-penyimpangan yang berdampak buruk kepada sasaran dan tujuan organisasi. Hal ini dapat terjadi oleh berbagai faktor, baik secara internal organisasi yaitu lemahnya ketaatan dari pendukung organisasi maupun secara eksternal organisasi berupa perumusan-perumusan regulasi atau perundang-undangan yang sering kali berbenturan dengan kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lainnya sehingga dapat membuka peluang kondisi tidak tertib. Oleh sebab itu pengawasan memegang peranan penting untuk terciptanya kondisi yang tertib sehingga tujuan organisasi yang berhasil dan berdaya guna dapat dicapai.

Metode pengawasan di atas selanjutnya dapat diuraikan sebagaimana penjelasan berikut:

Add 1. Pengawasan Langsung

Pengawasan dengan cara ini, seorang pimpinan atau aparat pengawasan organisasi melakukan pemeriksaan langsung pada tempat pelaksanaan pekerjaan baik dengan sistem inspektif, verifikatif maupun dengan sistem investigatif. Metode ini digunakan agar segera dapat dilakukan tindakan perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan pekerjaan. Atau dengan kata lain pengawasan dengan cara ini orang atau badan yang akan diperiksa tidak melalui laporan tetapi langsung oleh pimpinan atau tim pemeriksa.

Add 2. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan dengan cara ini pengawas atau pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan hanya melalui laporan-

laporan yang masuk padanya. Laporan-laporan tersebut dapat berupa uraian kata-kata, deretan angka atau statistik yang berisi gambaran hasil kemajuan yang telah dicapai sesuai dengan pengeluaran biaya anggaran yang telah direncanakan sebelumnya. Kelemahan dari pengawasan tidak langsung yaitu tidak dapat langsung diketahui kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan, sehingga dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar terhadap organisasi yang sedang dilaksanakan.

Add 3. Pengawasan Formal

Pengawasan formal ini dilaksanakan oleh aparat pengawasan yang bertindak atas nama pimpinan organisasinya atau atasan dari pimpinan organisasi tersebut. Dalam pengawasan ini terlebih dahulu ditentukan prosedur, hubungan dan tata kerjanya. Misalnya periode waktu pemeriksaan, periode waktu pertanggungjawaban dan periode waktu laporan. Aparat pengawasan ini harus melaporkan secara periodik perkembangan dari hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan terhadap pimpinan. Laporan-laporan tersebut harus disertai saran-saran perbaikan atau penyempurnaannya, maksudnya laporan dari aparat pengawasan ini agar pimpinan selalu mengikuti perkembangan segala hal yang terjadi dalam organisasi.

Add 4. Pengawasan Informal

Pengawasan informal dengan tidak melalui saluran formal atau prosedur yang telah ditentukan. Pengawasan informal ini dilakukan oleh pejabat atau pimpinan dengan melalui kunjungan yang tidak resmi atau secara

pribadi. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kecanggungan dalam hubungan antara atasan dan bawahan. Dengan cara demikian pimpinan menghendaki keterbukaan dalam memperoleh informasi dan data sekaligus usul-usul atau saran perbaikan dan penyempurnaan dari bawah. Masalah-masalah yang dihadapi bawahannya yang tidak mungkin dipecahkan sendiri, dalam hal ini pimpinan dapat memberikan jalan keluar pemecahannya. Sebaliknya bawahan juga merasa bangga karena diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya secara langsung terhadap pimpinannya. Jelaslah bahwa pengawasan informal mendekatkan hubungan pribadi yang bersifat formal. Hal ini sangat menguntungkan terhadap pelaksanaan tugas-tugas organisasi.

Add 5. Pengawasan Administratif

Pengawasan administratif meliputi bidang keuangan, kepegawaian dan material. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

a. Pengawasan Keuangan

Pengawasan keuangan meliputi pos-pos anggaran (rencana anggaran), pelaksanaan anggaran, yang meliputi pengurusan administratif dari pengurusan bendaharawan. Hal ini menyangkut prosedur penerimaan uang. Dalam prosedur penerimaan berhubungan dengan Surat Keputusan Otoritas (SKO) sesuai dengan pos-pos anggaran, sedangkan yang berhubungan dengan prosedur pengeluaran uang berhubungan dengan syarat-syarat yang diperlukan dalam pembayaran, yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran dan hasil pembayaran.

b. Pengawasan Kepegawaian

Pengawasan kepegawaian menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan administrasi kepegawaian, yaitu perihal kebenaran prosedur penerimaan pegawai. Pengawasan kepegawaian disamping penilaian terhadap kewajiban-kewajiban mereka yang harus dilaksanakan juga menyangkut terhadap hak-hak mereka yang harus dipenuhi, misalnya gaji, kenaikan pangkat, dan fasilitas-fasilitas lain.

c. Pengawasan Material

Pengawasan material ialah untuk mengetahui apakah barang-barang yang disediakan atau (dibeli) sesuai dengan rencana pengadaannya, kuantitas dan kualitas, penyimpanan, pengakuan dan pemeliharaannya. Bukti penerimaan dan pengeluaran barang, jenis-jenis barang, merek pabrik, tahun pembuatan dan perusahaan yang menjual. Pengawasan material ini harus ditentukan barang yang telah ditentukan.

Add 6. Pengawasan Teknis

Pengawasan teknis ini dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat fisik, misalnya pemeriksaan terhadap pembangunan gedung, pemeriksaan terhadap pembuatan kapal dan sebagainya. Pemeriksaan ini meliputi jenis kuantitatif dan kualitatif serta biaya yang diperlukan setiap tahunnya. Pengawasan teknis dilakukan dengan ukuran-ukuran atau standar, misalnya: standar harga, standar kualitas, standar kuantitas dan sebagainya yang telah ditentukan oleh pemerintah dan yang berlaku dengan situasi dan kondisi setempat. Pengawasan teknis biasanya disertai dengan seorang

ahli dibidang tersebut agar dapat mengadakan penilaian secara objektif. Pengawasan ini dilakukan dengan pemeriksaan di tempat agar jelas diketahui apakah hasil pelaksanaannya sesuai dengan standar yang telah ditentukan atautkah tidak.

Efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektivitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Sebagai contoh jika sebuah tugas dapat selesai dengan pemilihan cara-cara yang sudah ditentukan, maka cara tersebut adalah benar atau efektif.

Anoraga (2000: 178) menyatakan bahwa: “Efektivitas berhubungan dengan pencapaian tujuan yang lebih dikaitkan dengan hasil kerja”. Kata kunci efektivitas adalah efektif, karena pada akhirnya keberhasilan perusahaan diukur dengan konsep efektivitas. Pengertian efektivitas mempunyai arti yang berbeda bagi setiap orang, tergantung kepada kerangka acuan yang dipakainya. Seorang ahli ekonomi mempunyai persepsi bahwa efektivitas organisasi akan semakna dengan keuntungan atau laba.

Selanjutnya Steers (2006: 87) mengemukakan bahwa:

Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya.

Lebih lanjut menurut Kurniawan (2005: 109) mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: “Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi

(operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya”.

Dari beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (*input*), proses, maupun keluaran (*output*). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.

2 Ukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (*output*) barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah

ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif. Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh Siagian (2008:77), yaitu:

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
3. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
4. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
5. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
6. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
7. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
8. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

Adapun kriteria untuk mengukur efektivitas suatu organisasi ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, seperti yang dikemukakan oleh Martani dan Lubis (2005: 55), yakni:

1. Pendekatan Sumber (*resource approach*) yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

2. Pendekatan proses (*process approach*) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi.
3. Pendekatan sasaran (*goals approach*) dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output) yang sesuai dengan rencana.

Selanjutnya Steers dalam Tangkilisan (2005: 141) mengemukakan 5 (lima)

kriteria dalam pengukuran efektivitas, yaitu:

1. Produktivitas
2. Kemampuan adaptasi kerja
3. Kepuasan kerja
4. Kemampuan berlabar
5. Pencarian sumber daya

Sedangkan Duncan yang dikutip Steers (2006: 53) mengatakan mengenai

ukuran efektivitas, sebagai berikut:

1. Pencapaian Tujuan
Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkret.
2. Integrasi
Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.
3. Adaptasi
Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

Berdasarkan konsep yang diutarakan Steers tersebut maka acuan untuk mengukur efektivitas dapat menggunakan Perspektif sistem. Perspektif sistem ini adalah untuk melihat optimalisasi dari komponen-komponen sistem tersebut yang terdiri dari komponen dasar yaitu *input*, *throughput* dan *output* dalam pencapaian tujuan.

Menurut Moenir,dkk (2004: 34), unsur-unsur efektivitas meliputi:

1. *Input* (masukan), yang meliputi semua sumber daya yang dimiliki, informasi, pengetahuan, bahan-bahan mentah serta modal.
2. *Conversion* (perubahan), yaitu tahap yang ditentukan oleh kemampuan organisasi untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, manajemen dan penggunaan teknologi agar dapat menghasilkan nilai.
3. *Output* (keluaran) yaitu : pelayanan yang diberikan yang merupakan hasil dari penggunaan teknologi dan keahlian sumber daya manusia.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka konteks penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas penyaluran raskin yang menggunakan perspektif sistem yang terdiri dari tiga komponen, yaitu :

ad 1. *Input* (masukan)

Input yang akan digunakan sebagai indikator pada penelitian ini adalah sumber daya, dana dan petugas penyalur raskin. Sumber daya yang dimaksud meliputi sumber daya manusia dan sarana dan prasarana yang digunakan. Dalam hal ini petugas penyalur raskin yang merupakan modal dalam bentuk sumber daya manusia yang paling penting karena merupakan ujung tombak, begitu juga dengan sarana dan prasarana dan dana yang digunakan dalam penyaluran raskin. Jika sarana dan prasarana memadai maka akan mempermudah petugas melakukan pemungutan. Sedangkan dana, merupakan salah satu motivasi yang berupa intensif untuk petugas dalam penyaluran raskin. Warga miskin menjadi salah satu

indikator dalam *input* karena warga miskin merupakan salah satu faktor terjadinya proses penyaluran raskin. Keempat faktor ini sangat berpengaruh dalam *Throughput* (proses) dan *output* (keluaran) dari proses penyaluran raskin tersebut. Sub indikator sumber daya yang akan diteliti antara lain SDM hanya pada kualitas dan kuantitas petugas penyaluran raskin, kelengkapan sarana dan prasarana penyaluran raskin. Sub indikator dana adalah upah penyaluran raskin.

ad 2. *Throughput* (proses)

Yakni merupakan proses pengolahan *Input* menjadi *output*. Proses penelitian yang akan berlangsung adalah penyaluran raskin yang dalam hal ini dilakukan oleh pemerintah desa.

Adapun untuk mengetahui indikator efektivitas komponen atau aspek *Throughput* ini meliputi indikator, yaitu : Kepatuhan pada mekanisme penyaluran raskin

ad 3. *Output* (keluaran)

Merupakan hasil dari pekerjaan atau dari proses pemungutan. Pada penelitian ini maka *output* atau keluaran yang dihasilkan proses ini adalah pencapaian realisasi dari target pajak yang ditetapkan Efektivitas *output* ini dinilai menurut ukuran seberapa jauh sebuah organisasi mencapai tujuan.

Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Miskin. Di samping itu, program ini dimaksudkan untuk meningkatkan akses masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokoknya sebagai salah satu hak dasar masyarakat.

Hal ini merupakan salah satu program pemerintah baik pusat maupun daerah yang penting dalam peningkatan ketahanan pangan nasional. Program Raskin masuk dalam klaster (kelompok) I program penanggulangan kemiskinan tentang Bantuan dan Perlindungan Sosial, yang bersinergi dengan program pembangunan lainnya, seperti program perbaikan gizi, peningkatan kesehatan dan pendidikan. Sinergi antar berbagai program ini penting dalam meningkatkan efektivitas masing-masing program dalam mencapai tujuan.

Efektivitas Program Raskin 2016 dapat ditingkatkan melalui koordinasi antar lembaga/instansi terkait baik di tingkat pusat maupun daerah. Koordinasi dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, dengan mengedepankan peran penting partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, camat mempunyai tugas untuk menyukseskan tercapainya program Raskin dalam pembangunan. Dalam fungsi camat diperlukannya fungsi pengawasan, yang bertujuan agar setiap kegiatan yang dilaksanakan itu sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Adapun yang dimaksud dengan pengawasan adalah sebagaimana didefinisikan oleh Abdulrachman (1979: 99) yaitu:

“Pengawasan adalah kegiatan untuk mengetahui apakah pelaksanaan kerja atau hasil pelaksanaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, intruksi yang telah ditentukan semula dan apabila didapat perbedaan-perbedaan, maka tindakan-tindakan perbaikan diadakan”.

Dari pendapat para ahli tersebut jelas bahwa pengawasan merupakan kegiatan yang dilaksanakan setelah program terlaksana atau program itu sedang berlangsung dan pengawasan tersebut mengevaluasi semua pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan agar sesuai dengan rencana, tujuan atau kebijaksanaan yang telah

ditentukan. Dengan demikian kegiatan pengawasan dilaksanakan bertujuan agar hasil pelaksanaan pekerjaan tersebut memperoleh hasil yang baik dan benar sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Agar pelaksanaan dalam penyaluran beras miskin berhasil maka seorang pemimpin dalam melaksanakan pengawasan harus mengetahui dan menjalankan prosedur pengawasan. Menurut Handyaningrat (1996: 151) mengemukakan syarat-syarat pengawasan yang efektif, yang mana:

1. Pengawasan harus dihubungkan dengan rencana dan kedudukan seseorang.
2. Pengawasan harus dikaitkan dengan individu pimpinan dan pribadi
3. Pengawasan harus dapat menunjukkan penyimpangan-penyimpangan pada hal-hal yang penting
4. Pengawasan harus objektif
5. Pengawasan harus luwes
6. Pengawasan harus hemat
7. Pengawasan harus membawa tindakan perbaikan

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang (*view point*) dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi.

Efektivitas merupakan gambaran tingkat keberhasilan atau keunggulan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan adanya keterikatan antara nilai-nilai yang bervariasi. Efektivitas akan berkaitan dengan kepentingan orang banyak, seperti yang dikemukakan Emerson yang dikutip Handyaningrat (1996:16) sebagai berikut: “Efektivitas merupakan penilaian hasil pengukuran

dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas perlu diperhatikan sebab mempunyai efek yang besar terhadap kepentingan orang banyak”

Kajian tentang efektivitas mengacu pada dua kepentingan yaitu baik secara teoritis maupun secara praktis, artinya adanya ketelitian yang bersifat komprehensif dan mendalam dari efisiensi serta kebaikan-kebaikan untuk memperoleh masukan tentang produktifitas. Efektivitas merupakan keadaan yang berpengaruh terhadap suatu hal yang berkesan, kemandirian, keberhasilan usaha, tindakan ataupun hal yang berlakunya.

Menurut Moenir,dkk (2004: 34) unsur-unsur efektivitas meliputi : 1) *Input* (masukan), yang meliputi semua sumber daya yang dimiliki, informasi, pengetahuan, bahan-bahan mentah serta modal, 2) *Conversion* (perubahan), yaitu tahap yang ditentukan oleh kemampuan organisasi untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, manajemen dan penggunaan teknologi agar dapat menghasilkan nilai, 3) *Output* (keluaran) yaitu : pelayanan yang diberikan yang merupakan hasil dari penggunaan teknologi dan keahlian sumber daya manusia.

1.3 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Sugiyono (2009 : 15) menyatakan bahwa: “Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang menggunakan data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh masyarakat penerima raskin di Kecamatan Banjar yang berdasarkan data sebanyak 2.916 kepala keluarga.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah secara acak sederhana. Arikunto (2009: 85) mendefinisikan bahwa "Teknik acak sederhana (*simple random sampling*) artinya setiap anggota atau unit dari populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk diseleksi sebagai sampel" dan didapat 96,7 (dibulatkan 97).

4.1. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Deskripsi Variabel Pengawasan

Rekapitulasi hasil angket tentang pengawasan dapat diambil hasil evaluasi tanggapan responden dapat pada tabel rekapitulasi berikut:

TABEL
REKAPITULASI HASIL PENYEBARAN ANGKET
VARIABEL PENGAWASAN (VARIABEL X)

NO	Urian Pertanyaan	Skor
1.	Pengawasan oleh camat sudah sesuai dengan rencana	297
2.	Camat dalam melakukan pengawasannya menggunakan pedoman	266
3.	Camat dapat meyakinkan bahwa apa yang diselesaikan itu sesuai dengan rencana.	265
4.	Pengawasan yang dilakukan camat dikaitkan dengan tanggung jawabnya	186
5.	Pengawasan yang dilakukan camat dibedakan sesuai dengan kedudukan orangnya	279
6.	Pengawasan yang dilakukan camat sesuai dengan ketentuan organisasi	278
7.	Pengawasan yang dilakukan camat sesuai dengan, susunan kepegawaian di kecamatan	266
8.	Sistem pengawasan membantu camat dalam melaksanakan tugasnya	265
9.	Pengawasan yang dilakukan camat bertujuan untuk memperoleh informasi	297
10.	Pengawasan yang dilakukan camat sudah efisien	266
11.	Pengawasan yang dilakukan camat sudah efektif	297
12.	Pengawasan yang dilakukan camat sesuai dengan prinsip organisasi	266

13.	Pengawasan yang dilakukan camat sesuai standar yang ditetapkan	265
14.	Pengawasan yang dilakukan camat selalu efektif	283
15.	Pengawasan yang dilakukan camat selalu Fleksibel	265
16.	Biaya pengawasan yang dilakukan camat relatif hemat.	283
17.	Besarnya biaya pengawasan lebih kecil dari hasil yang diperolehnya	279
18.	Pengawasan oleh camat dapat mencegah kesalahan	278
19.	Pengawasan oleh camat berguna untuk perbaikan	266
20.	Pengawasan oleh camat tergantung kebutuhan	265
Jumlah		5412
Rata-rata		271

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.21 di atas maka pengawasan kepala desa berada pada kategori ragu-ragu dengan skor 271 dan dapat dilihat dari interval sebagai berikut:

Deskripsi Data Efektivitas Pelayanan

Berdasarkan hasil analisis dari perolehan jawaban angket efektivitas pelayanan dapat dijelaskan sebagai berikut:

TABEL
REKAPITULASI VARIABEL EFEKTIVITAS PELAYANAN (Y)

N O	Uraian Pertanyaan	Skor
1.	Semua sumber daya yang dimiliki kecamatan memadai	264
2.	Informasi tentang penerima raskin akurat	251
3.	Petugas memiliki Pengetahuan yang baik tentang teknik penyaluran raskin	290
4.	Stok raskin mencukupi rumah tangga miskin yang berhak	284

	mendapat bantuan	
5.	Stok raskin masih terjaga dengan baik	260
6.	Kecamatan mempunyai kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki	245
7.	Sistem penyaluran raskin di kecamatan sudah baik	252
8.	Kecamatan sudah menggunakan komputer dalam pelaporan raskin	253
9.	Pelayanan raskin hasil dari penggunaan teknologi informasi	271
10.	Kecamatan mempunyai tenaga ahli dalam penyaluran raskin	274
Jumlah		2664
Rata-rata		266

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2016

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.32 di atas efektifitas penyaluran beras untuk keluarga miskin di Kecamatan Banjar Kota Banjar termasuk kategori ragu-ragu dan dapat dilihat dari interval sebagai berikut :

3. Pengaruh Pengawasan Kepala Desa Terhadap Efektifitas Penyaluran Beras Untuk Keluarga Miskin

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan kepala dinas sosial dan tenaga kerja terhadap Efektivitas pelayanan peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di dengan hasil nilai R sebesar 0,608. Sehingga dapat dikatakan terdapat pengaruh kuat pengawasan terhadap

efektivitas penyaluran beras untuk rumah tangga miskin di Kecamatan Banjar Kota Banjar.

Selanjutnya nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar:

$$Kd = (r^2) \times 100\%$$

$$\begin{aligned} Kd &= (0,608^2) \times 100\% \\ &= 36,99\% \end{aligned}$$

Hal ini berarti 36,99 % variabel efektifitas penyaluran beras untuk keluarga miskin di Kecamatan Banjar Kota Banjar dipengaruhi oleh pengawasan. Sedangkan sisanya 63,01% dipengaruhi oleh variabel lain yang dalam penelitian ini tidak dibahas seperti disiplin, kemampuan, dan sikap kerja.

1.5 Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian tentang pengaruh pengawasan terhadap efektifitas penyaluran beras untuk keluarga miskin di Kecamatan Banjar Kota Banjar, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengawasan dalam penyaluran beras untuk keluarga miskin di Kecamatan Banjar Kota Banjar berada pada kategori cukup.
2. Efektivitas penyaluran beras untuk keluarga miskin di Kecamatan Banjar Kota Banjar termasuk kategori cukup.
3. Terdapat pengaruh pengawasan terhadap efektifitas penyaluran beras untuk keluarga miskin di Kecamatan Banjar Kota Banjar dengan R sebesar 0,608

dan KD sebesar 36,99 % yang berarti variabel pengawasan memberikan pengaruh sebesar 36.99% terhadap efektivitas penyaluran beras untuk keluarga miskin di Kecamatan Banjar Kota Banjar. Sedangkan sisanya 63,01% dan t hitung $7,703 > t$ tabel 1,67

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan serta permasalahan-permasalahan yang ditemukan, maka peneliti menyampaikan beberapa saran, diantaranya:

1. Camat dapat meningkatkan pengawasan dalam penyaluran beras untuk keluarga miskin di Kecamatan Banjar Kota Banjar terutama dalam menentukan prosedur hubungan dan tata kerjanya, dan senantiasa melaksanakan pemeriksaan kesehatan pegawai dan sebagainya karena point-point tersebut berniali rendah.
2. Efektivitas pelayanan penyaluran beras untuk keluarga miskin di Kecamatan Banjar Kota Banjar agar lebih tepat sasaran dengan lebih akurat dalam memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan karena point-point tersebut berniali rendah.
3. Untuk meningkatkan efektivitas pelayanan penyaluran beras untuk keluarga miskin di Kecamatan Banjar Kota Banjar, kepala desa hendaknya meningkatkan pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung terutama dalam pemberian informasi pada masyarakat dan memperbaiki teknik pengambilan keputusan.